

DAFTAR ISI

HALAMAH JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	14
1. Kewenangan Memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi	20
2. Kewenangan Memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi	24
B. Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia	29
C. Problematika Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah	33
D. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia	37
1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum	40
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah	52
E. Sengketa Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Peradilan Umum ...	66
F. <i>Judicial Restraint</i> dan <i>Judicial Activism</i> terhadap Kekuasaan Kehakiman di	

1. Penerapan <i>Judicial Restraint</i> di Lingkungan Peradilan	69
2. Penerapan <i>Judicial Activism</i> di Lingkungan Peradilan	71
BAB III METODE PENELITIAN	75
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	75
B. Data dan Bahan Penelitian	77
C. Teknik Pengumpulan Data	79
D. Teknik Analisis Data	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81
A. Analisa Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemlihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah	81
1. Konstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengketa Proses dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur	85
a. Konsep Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif pada Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur	98
b. Interpretasi Keadaan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur	116
c. Pendekatan yang Digunakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur	130
2. Analisis Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	138
a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	155

Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	169
c. Pendekatan yang Digunakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	183
B. Implikasi Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	197
1. Pergeseran Paradigma Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengketa Proses dan Pelanggaran TSM	203
2. Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengketa Proses dan Pelanggaran Pemilu/Pilkada Pasca Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	206
C. Penerapan Pendekatan yang Berbeda dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu/Pilkada di Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Keadilan Pemilu	213
1. Pendekatan <i>Judicial Restraint</i> dan <i>Judicial Activism</i> di Mahkamah Konstitusi terhadap Penegakan Keadilan Pemilu/Pilkada	213
2. Implikasi <i>Judicial Restraint</i> dan <i>Judicial Activism</i> dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu/Pilkada terhadap Penegakan Keadilan Pemilu	225
BAB V PENUTUP	236
A. Kesimpulan	236
B. Saran	238
DAFTAR PUSTAKA	240